



► **MASALAH KETENAGAKERJAAN**

Oknum di Satpol PP Diduga Terlibat Gratifikasi

UMBULHARJO—Dugaan gratifikasi dalam pengadaan tenaga pengamanan Satpol PP Kota Jogja mencuat setelah salah satu mantan petugas keamanan mengadu ke Dewan. Saat ini kasus tersebut ditangani Inspektorat Kota Jogja.

*Triyo Handoko
 triyo@harianjogja.com*

Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat meminta pihak yang terlibat menunjukkan bukti-bukti yang ada. Dia menegaskan akan menaati proses penyidikan Inspektorat Kota Jogja atas masalah tersebut. "Karena sudah ditangani Inspektorat, kami akan menunggu hasilnya. Kami siap menaati hasil investigasi perkara ini, termasuk rekomendasi yang ada," katanya, Jumat (19/5).

Tenaga pengamanan Satpol PP Kota Jogja, kata Octo, memang disediakan dengan cara *outsourcing*. "Aturan dari Pusat adalah *outsourcing*, termasuk tenaga kebersihan, ada tiga perusahaan yang bekerja sama menyediakan tenaga pengamanan di kantor kami," katanya.

Kasus dugaan gratifikasi ini mencuat setelah F, seorang mantan petugas keamanan Satpol PP Kota Jogja diberhentikan pada Maret lalu tanpa alasan yang jelas. Merasa kecewa, F kemudian mengadu ke DPRD Kota Jogja.

Anggota DPRD Kota Jogja, Antonius

- Total ada 13 tenaga pengamanan yang disediakan lewat *outsourcing* yang dipecah tanpa dasar.
- Pegawai baru ini diduga memberikan sejumlah uang ke oknum tertentu agar diterima bekerja.

Fokki Ardiyanto yang menindaklanjuti aduan tersebut menyebut total ada 13 tenaga pengamanan yang disediakan lewat *outsourcing* yang dipecah tanpa dasar. "Mereka tak berani mengadu, hanya satu orang itu yang berani mengadu ke kami [Dewan]," katanya, Jumat.

Fokki menjelaskan F menandatangani kontrak kerja pada Desember 2022. "Dalam perjanjian kerja kontrak tersebut jangka waktunya setahun, tapi belum ada setahun yang bersangkutan sudah dipecah tanpa ada alasan yang jelas," katanya.

Sebelumnya, F tidak pernah mendapat teguran lisan, surat peringatan, atau apapun yang menjelaskan kesalahan kerjanya. "Mereka diundang, kemudian langsung diberhentikan. Hak sebagai pekerja seperti pesangon dan lainnya juga tidak terpenuhi, ini yang akan saya perjuangkan," katanya.

Fokki menyebut dugaan gratifikasi ditemukan setelah jajarannya berkomunikasi dengan berbagai pihak. "Mereka yang dipecah ini diganti oleh orang [pegawai] baru. Nah, pegawai baru ini diduga memberikan sejumlah uang ke oknum tertentu agar diterima bekerja," ujarnya.

Kasus dugaan gratifikasi ini, kata Fokki,

tengah diproses di Inspektorat Kota Jogja. "Kami minta Inspektorat mendengar keluhan 13 orang yang dipecah ini, hak-hak mereka tolong diperhatikan, jangan sampai hanya memberi rekomendasi yang tidak berdampak positif kepada para korban," katanya.

Terjadi di Kantor Lain

Dijelaskan Fokki, dugaan gratifikasi atau pemberian hadiah kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan tertentu yang mencuat di Satpol PP Jogja diduga juga terjadi di instansi lain. Fokki mengaku telah menerima pengaduan kasus serupa yang terjadi di instansi lain. "Setelah kasus Satpol PP Jogja mencuat, tadi [kemarin] saya juga menerima laporan dari mantan pekerja *outsourcing* yang kasusnya mirip, masih akan saya dalam aduannya," kata Fokki, Jumat sore.

Pekerja *outsourcing* di lingkungan Pemkot Jogja, kata Fokki, yang menemukan atau mengalami permasalahan serupa dapat melaporkan ke DPRD Kota Jogja. "Sebagai wakil rakyat dan pengawas pemerintah kami tentu akan menerima aduan tersebut dan menindaklanjutinya," katanya.

Sementara, Sekretaris Satpol PP Kota Jogja, Hery Eko Prasetyo membenarkan adanya mutasi jabatan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Jogja. "Posisi tersebut sekarang diisi oleh pelaksana tugas, saya tak tahu selebihnya, silakan langsung ke yang bersangkutan," kata dia, Jumat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005